



LAPORAN KINERJA

CAMAT TAMAN

TAHUN 2022

KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG

Jalan Kapten Piere Tendean No.02 Taman 52361
Telp. (0284) 3277621

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	5
1.4 Keuangan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Organisasi.....	13
2.2 Rencana Kinerja.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	
3.1 Capaian Kinerja.....	28
3.2 Realisasi Anggaran	40
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
3.4 Inovasi.....	48
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Fauzan, S.Sos, M.Si, Camat Taman Kabupaten Pematang Tahun 2022	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.3.1 : Kondisi Kepegawaian Kecamatan Taman Tahun 2022 berdasarkan Eselon.....	6
Tabel 1.3.2 : Kondisi Kepegawaian Kecamatan Taman Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 1.3.3 : Kondisi Kepegawaian Kecamatan Tahun 2022 Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 1.3.4 : Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022	8
Tabel 2.1.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2022.....	14
Tabel 2.2.1 : Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 2.3.1 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2022.....	16
Tabel 2.3.2 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2022.....	16
Tabel 2.3.3 : Program dan Anggaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2022.....	17
Tabel 2.3.4 : Program dan Kegiatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2022.....	18
Tabel 3.1.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 3.1.2 : Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja.....	29
Tabel 3.1.3 : Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja.....	30
Tabel 3.1.4 : Pengukuran Kinerja Sasaran I.....	31
Tabel 3.1.5 : Pengukuran Kinerja Sasaran II.....	38
Tabel 3.3.1 : Capaian/Serapan Anggaran Program dan Kegiatan.....	40
Tabel 3.3.1 : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan SDM Kecamatan Tahun 2022.....	47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

- Gambar 1.2.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah Tahun 20224
- Gambar 1.2.2 : Susunan Organisasi Kelurahan pada Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah Tahun 20225

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

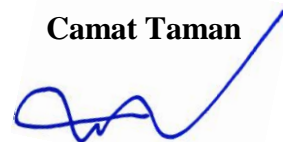
Laporan Kinerja (LKJIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2021.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Pemalang, 31 Januari 2022

Camat Taman



Fauzan, S.Sos, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Taman Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Taman yang dicapai di tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
Indikator : Cakupan layanan kecamatan

Tahun 2022 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang menargetkan 77,72% untuk indikator Cakupan Layanan Kecamatan. Adapun realisasinya adalah sebesar 87,03%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Cakupan Layanan Kecamatan untuk tahun 2022 adalah sebesar 111,98 %.

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2022 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang menargetkan 79,5 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun realisasinya adalah sebesar 85,49. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2022 adalah sebesar 107,53 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Kecamatan Taman melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dengan didukung peningkatan kapasitas petugas pelayanan dengan program inovatif.
2. Meningkatkan kualitas dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Taman
3. Diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon pada Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah menyusun LKJIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. LKJIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKJIP adalah menyajikan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran.

Laporan LKJIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tahun berikutnya;
4. Bahan pertimbangan pengambilan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen LKJIP Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016- 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 66 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pemalang tahun 2021.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang sebagai implementasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mempertanggung jawabkan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepada Kepala Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan azas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang tanggal 2 Januari 2022 Nomor 060/4/Organisasi perihal Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka setiap OPD wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022.

1.2 Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang Kecamatan Taman dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan akan direfleksikan dalam program kerja atau rencana strategis yang merupakan konsekuensi kelembagaan dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Program kerja atau rencana strategis disusun dengan memperhatikan profesionalisme aparatur. Profesionalisme dimaksud sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, yang pada gilirannya dijadikan sebagai dasar “*Publik Report*” sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan akuntabilitas publik.

Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya. Selain itu, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Taman juga mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
- i. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2 Struktur Jabatan

Kecamatan Taman ditetapkan penataan organisasinya dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 72 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang sebagai berikut :

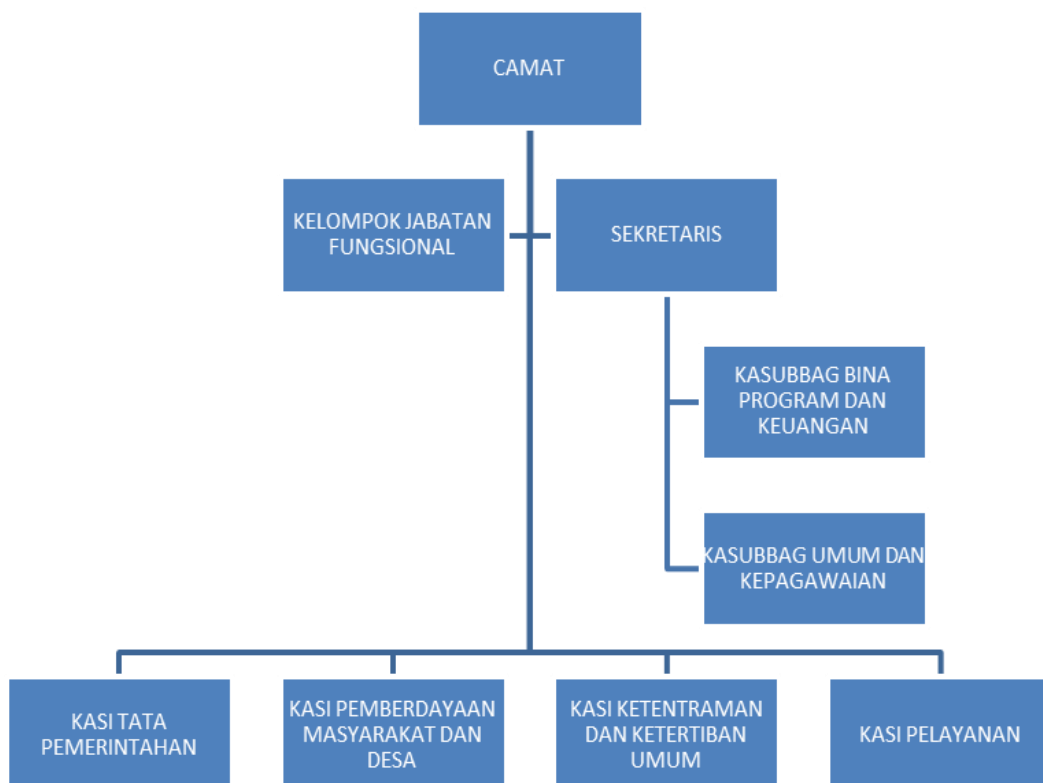
- Kecamatan
 - a. Camat
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Tata Pemerintahan
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - f. Seksi Pelayanan
- Kelurahan
- a. Lurah
 - b. Sekretaris Lurah
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - d. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
 - e. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Taman sebagai berikut :

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kecamatan Taman

Gambar 1.2.1
Struktur Organisasi
Kecamatan Taman Kabupaten Pemang Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.2.2 Susunan Organisasi Kelurahan



Sumber : Pergub Jawa Tengah Nomor xx Tahun 201x

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1. Isu Strategis

Dalam penentuan strategi, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang juga tidak terlepas dari strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan capaian kinerja pemerintah melalui peningkatan kapasitas aparatur;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasitas aparatur;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui penerapan SOP/SPP maklumat pelayanan secara konsisten dan menyeluruh

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Taman antara lain:

a. Personil

Secara umum jumlah personil dilingkungan Kecamatan Taman sudah memadai, namun di beberapa bagian masih membutuhkan tambahan personil dan belum meratanya distribusi personalia sesuai kualitas dan kapasitasnya. Untuk itu masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada.

b. Pendanaan

Biaya Operasional dan Insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

c. Sarana dan Prasarana

- Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan komputer belum mencukupi
- Kondisi fisik gedung perkantoran masih perlu diperbaiki sebagai fasilitas jasa layanan umum;

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut:

- a. Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah-langkah kongkret, untuk mengefektifkan operasional pelayanan;
- b. Merencanakan renovasi gedung kantor Kecamatan Taman untuk meningkatkan kinerja/pelayanan;
- c. Menumbuhkan partisipasi pihak-pihak yang terlihat dan peduli terhadap layanan;

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Taman didukung oleh 23 (dua puluh tiga) orang PNS di Kecamatan dan 19 (sembilan belas) orang PNS di Kelurahan Wanarejan Selatan dan Kelurahan Beji. Kondisi kepegawaian berdasarkan eselon, pendidikan, dan golongan di Kecamatan Taman dapat dilihat pada tabel – tabel berikut :

Tabel 1.3.1

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Taman Tahun 2022

Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	IIIA	1	1	
2	IIIB	1	1	
3	IVA	6	4	2
4	IVB	12	7	5
Jumlah		20	13	7

Jumlah pegawai Kecamatan Taman berdasarkan tingkat eselon, yaitu Eselon IIIA sebanyak 1 orang, Eselon IIIB sebanyak 1 orang, Eselon IVA sebanyak 6 orang, Eselon IVB sebanyak 12 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Kecamatan Taman berdasarkan tingkat eselon dominan eselon IVB yaitu sebanyak 60%

Tabel 1.3.2
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Taman Tahun 2021
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	6	4	2
2	Sarjana (S1)	15	6	11
3	Diploma	4	2	2
4	SLTA	57	20	37
5	SLTP	4	2	2
6	SD	1	1	0
Jumlah		89	35	54

Jumlah pegawai Kecamatan Taman berdasar tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 orang, Diploma sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 57 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di Kecamatan Taman sudah tercukupi, yaitu dengan dominasi berpendidikan SLTA sebanyak 65%. Jumlah tersebut sudah dihitung tenaga honorer yang ada.

Tabel 1.3.3
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Taman Tahun 2021
Berdasarkan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
Kecamatan Taman						
1.	Camat				1	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan				1	1 orang
3.	Kepala Seksi			4		4 orang
4.	Kepala Sub Bagian			2		2 orang
5.	JFU kecamatan		8	7		15 orang
6.	Non ASN kecamatan	14				13 orang
Kelurahan						
7.	Lurah			2		2 orang
8.	Sekretaris Kelurahan			2		1 orang
9.	Kepala Seksi Kelurahan			5	1	4 orang
10.	JFU kelurahan	1	9	2		12 orang
11.	Non ASN kelurahan	31				28 orang
	JUMLAH	46	17	24	3	89 ORANG

Jumlah pegawai berdasarkan golongan, meliputi golongan I sebanyak 46 orang golongan II sebanyak 17 orang, golongan III sebanyak 24 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Kecamatan Taman dominan bergolongan I yaitu sebanyak 51%.

3. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Taman memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Tabel 1.3.4

Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun 2022

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Kecamatan Taman	272	1.338.706.568,00
	Alat-alat Besar	2	79.900.500,00
	- Compressor lain-lain	1	7.100.500,00
	- Portable Generating Set	1	72.800.000,00
	Alat-alat Angkutan	20	608.748.528,00
	- Station Wago	2	305.126.428,00
	- Sepeda Motor	18	258.622.100,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	241	600.557.040,00
	- Lemari Besi	7	46.282.034,00
	- Rak Besi/Metal	3	5.823.256,00
	- Filling Besi/Metal	5	7.700.000,00
	- Lemari Kaca	1	600.000,00
	- Lemari Kayu	2	1.600.000,00
	- Papan Visuil	1	900.000,00
	- Papan Pengumuman	1	400.000,00
	- Mesin Absensi	2	14.780.652,00
	- Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	1	4.000.000,00
	- Meja Rapat	6	14.826.000,00
	- Meja Reseption	1	11.500.000,00
	- Kursi Rapat	75	43.522.820,00
	- Kursi Tamu	3	5.600.000,00
	- Kursi Putar	6	6.151.632,00
	- Meja Komputer	2	2.050.548,00
	- Meja Biro	1	1.290.000,00
	- Sofa	2	18.525.000,00
	- Lemari Pakaian	2	3.000.000,00
	- Meja Tamu	2	7.550.000,00
	- Lemari Es	2	7.500.000,00
	- AC Unit	4	23.975.000,00
	- Kompor Gas	2	\3.030.000,00
	- Televisi	4	44.717.900,00
	- Loudspeaker	2	4.000.000,00

	- Sound System	2	16.900.000,00
	- Wireless	1	1.140.000,00
	- Microphone	1	1.250.000,00
	- Microphone Table Stand	2	1.500.000,00
	- Camera Video	1	16.350.000,00
	- Dispenser	2	5.000.000,00
	- Mimbar/Podium	1	25.350.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	1.207.500,00
	- P.C Unit	10	82.595.800,00
	- Laptop	11	85.771.420,00
	- Hard Disk	1	1.350.000,00
	- Printer	8	19.559.278,00
	- Scanner	1	650.000,00
	- Monitor	2	3.600.000,00
	- Printer	2	5.900.000,00
	- Scanner	1	1.475.000,00
	- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	14.300.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	800.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	3.000.000,00
	- Meja Pegawai Non Struktural	1	1.950.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	1.800.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	3.000.000,00
	- Kursi Kera Pegawai Non Struktural	1	750.000,00
	- Kursi Rapat Ruang Rapat Staff	44	20.733.200,00
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	4.800.000,00
	- Buffet Kayu	1	500.000,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	9	49.500.500,00
	- Camera + Attachment	1	15.000.000,00
	- Proyektor + Attachment	2	14.690.000,00
	- Camera Elektronik	1	7.470.500,00
	- Pesawat Telephone	1	3.000.000,00
	- Handy Talky	3	8.340.000,00
	- Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	1.000.000,00
2	Kelurahan Wanarejan Selatan	150	308.115.697,00
	Alat-alat Angkutan	3	58.944.000,00
	- Sepeda Motor	2	45.944.000,00
	- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	1	13.000.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	146	247.171.697,00
	- Filling Besi/Metal	5	12.188.040,00
	- Lemari Kaca	2	10.000.000,00
	- Papan Pengumuman	1	1.000.000,00
	- Mesin Absensi	2	14.780.652,00
	- Meja Kayu/Rotan	2	2.600.000,00
	- Kursi Kayu/Rotan/Bambu	5	5.638.750,00
	- Meja Rapat	2	5.130.000,00
	- Meja Tulis	3	4.353.750,00

	- Meja Panjang	1	840.000,00
	- Kursi Rapat	38	17.726.400,00
	- Kursi Lipat	37	15.499.855,00
	- Meja Komputer	1	908.000,00
	- Sofa	1	3.685.000,00
	- Kursi Plastik	1	731.250,00
	- AC Unit	3	24.400.000,00
	- Televisi	2	7.550.000,00
	- Sound System	2	13.200.000,00
	- Wireless	1	900.000,00
	- P.C Unit	1	11.900.000,00
	- Laptop	6	49.735.000,00
	- Printer	4	13.900.000,00
	- Meja Kerja Pegawai	6	18.750.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.155.000,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5	5.000.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	14	5.600.000,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1	2.000.000,00
	- Camera Elektronik	1	2.000.000,00
3	Kelurahan Beji	99	216.358.152,00
	Alat-alat Besar	1	1.500.000,00
	- Portable Water Pump	1	1.500.000,00
	Alat-alat Angkutan	2	27.044.000,00
	- Sepeda Motor	2	27.044.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	91	171.804.152,00
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1.500.000,00
	- Rak Besi/Metal	1	500.000,00
	- Rak Kayu	1	500.000,00
	- Papan Pengumuman	5	3.200.000,00
	- Mesin Absensi	2	14.780.652,00
	- Meja Kayu/Rotan	2	1.000.000,00
	- Kursi Besi/Metal	2	3.000.000,00
	- Meja Rapat	9	11.325.000,00
	- Kursi Rapat	7	5.000.000,00
	- Kursi Tamu	1	1.000.000,00
	- Kursi Putar	2	800.000,00
	- Meja Komputer	1	500.000,00
	- Meja Biro	5	10.000.000,00
	- Jam Elektronik	1	800.000,00
	- Lemari Es	1	2.500.000,00
	- AC Unit	1	7.169.000,00
	- Kipas Angin	7	5.690.000,00
	- Alat Dapur Lainnya	1	2.974.500,00
	- Tabung Gas	1	600.000,00
	- Televisi	2	5.000.000,00
	- Sound System	1	6.000.000,00
	- Wireless	1	1.500.000,00
	- Microphone	1	1.500.000,00
	- Mimbar/Podium	1	4.000.000,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	500.000,00

- P.C Unit	3	17.500.000,00
- Laptop	6	37.425.000,00
- Note Book	1	3.500.000,00
- Printer	1	2.000.000,00
- Printer	1	3.850.000,00
- Meja Kerja Pegawai Non	6	3.540.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	4.250.000,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	2.400.000,00
- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	6.000.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	16.010.000,00
- Camera + Attachment	1	3.000.000,00
- Proyektor + Attachment	1	9.500.000,00
- Camera Elektronik	1	2.500.000,00
- Pesawat Telephone	2	1.010.000,00

4. Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintah serta kewenangan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2022 dapat bermanfaat :

1. Meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan, keuangan dan pengelolaan rumah tangga dalam melayani kepentingan masyarakat dan dinas terkait dalam pelaksanaan tugas secara optimal dan berkelanjutan, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Kecamatan Taman.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara optimal dan berkelanjutan, secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan yang berwawasan pada kekuatan partisipatif publik secara berkelanjutan, menjadikan Kecamatan Taman yang akuntabel sehingga menjadi organisasi yang efisien, efektif dan responsip terhadap pelayanan publik menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Taman

1.4 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Pemalang.

Pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.378.511.000,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 0,- dan belanja langsung sebesar Rp.7.378.511.000,- berupa belanja pegawai sebesar Rp.5.633.176.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp.1.684.920.000,- dan belanja modal sebesar Rp.60.415.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Belanja langsung yang berasal dari APBD dan DAU sebesar Rp. 7.378.511.000,- yang didukung oleh 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Rencana strategis merupakan pedoman untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program kerja dalam menghadapi perubahan lingkungan. Perubahan tersebut merupakan satu tantangan yang penting untuk diadaptasi oleh program-program kerja dinas dengan tujuan akhir tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

Visi dan Misi

Visi adalah kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang mengemban visi misi sebagai berikut :

Visi Kecamatan Taman: **“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KECAMATAN SEBAGAI CERMIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFEKTIF DAN MEMUASKAN”**

Misi Kecamatan Taman :

- 1) Meningkatkan Disiplin, Loyalitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecamatan
- 2) Meningkatkan Koordinasi yang Mantap
- 3) Meningkatkan Tertib Administrasi Kecamatan
- 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima Guna Mewujudkan Kepuasan Public
- 5) Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan yan Mantap dan Dinamis

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan perencanaan strategis di Kabupaten Pemalang ada 3 (tiga) yaitu:

- 1) Terwujudnya kebijakan disektor ekonomi yang lebih roduktif dan kompetitif;
- 2) Meningkatnya layanan dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- 3) Meningkatnya kualitas peraturan perundang– undangan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 mempunyai sasaran strategis:

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Taman guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Taman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<p>1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP</p> <p>3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan</p> <p>4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah</p> <p>5. Meningkatkan penanganan potensi konflik</p> <p>6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</p>	<p>1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif</p> <p>1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhankepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan</p> <p>2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir</p> <p>2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman</p> <p>2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat</p> <p>3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</p> <p>4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten</p> <p>4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin</p> <p>5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa</p> <p>5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam</p> <p>6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset</p> <p>6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD</p>

2.2. Rencana Kinerja

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud,tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 2016– 2021 dengan mengambil target tahun 2022.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Taman Indikator Kinerja Utamanya dapat dilihat di tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan			indeks	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	87,5
2			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Cakupan Layanan Kecamatan	%	75,22	76,47	77,72	78,98	80,23	80,43	82,73	82,73

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2022 Camat Taman Kabupaten Pemalang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 2 sasaran strategis dan 6 sasaran program dengan targetnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Cakupan layanan kecamatan	%	77,72
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	79,5

Tabel 2.3.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Taman Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	31,50
	Meningkatnya penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	Nilai Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Skor	33,85
2	Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	85,56
3	Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	82
4	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100
5	Meningkatkan penanganan potensi konflik	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100
6	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	21,05

Adapun Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sejumlah 6 (enam) program dengan anggaran yang tersedia dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.3
Program dan Anggaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.016.189.520
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	24.500.100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	268.620.760
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.000.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.699.700
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.920
	JUMLAH	7.378.511.000

Tabel 2.3.4

Program dan Kegiatan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	33,85 indeks	5.645.175.880
		IRB	31,50 skor	689.887.540
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	7 dok	10.999.880
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2 dok	1.999.900
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 dok	1.999.800
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1 dok	1.000.080
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1 dok	1.999.900
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	1 dok	2.000.300
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	1 dok	1.999.900
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	46 dok	5.634.176.000
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	45 dok	5.633.176.000
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1 dok	1.000.000

		keuangan akhir tahun SKPD (dokumen)		
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	50 org	2.000.000
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	50 org	2.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang tersedia(paket)	35 paket	199.988.540
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1 paket	8.000.000
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang disediakan (paket)	1 paket	5.200.000
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	12 paket	118.095.000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2 paket	59.693.540
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	12 dok	5.000.000
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	6 lap	2.000.000
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	1 dok	2.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia (unit)	2 unit	30.000.000
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli (unit)	2 unit	30.000.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (laporan)	30 lap	270.291.400
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 lap	12.995.800
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan (laporan)	3 lap	45.414.000

1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	15 lap	211.881.600
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)	25 unit	187.607.600
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	14 unit	25.162.000
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	10 unit	33.645.600
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	1 unit	128.800.000
2	PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG TERSEDIA	85,56%	24.500.100
2.1	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jenis dokumen pemerintah yang dipublikasi (dokumen)	1 dok	16.999.500
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan (laporan)	1 lap	16.999.500
2.2	Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jenis dokumen pelayanan kepada masyarakat yang terselesaikan (dokumen)	1 dok	2.000.400
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan (laporan)	1 lap	2.000.400
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jenis dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia (kewenangan)	221 kew	5.500.200
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan (dokumen)	200 dok	1.140.400
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan (laporan)	21 lap	4.359.800
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG AKTIF	82%	34.500.760
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga peserta Musrenbang (Desa +	24 lembaga	30.000.800

		Kecamatan) (lembaga)		
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	21 lemb	2.000.000
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (laporan)	1 lap	18.000.400
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	1 lap	10.000.400
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (lembaga)	31 lemb	4.499.960
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (lembaga)	1 lemb	1.999.660
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	30 lemb	2.500.300
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM TINGKAT DESA DAN KECAMATAN YANG DAPAT DISELESAIKAN	100%	4.000.000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jenis laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (jenis)	1 jenis	2.000.000
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	1 lap	2.000.000
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya (peraturan)	1 peraturan	2.000.000
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan	1 lap	2.000.000

	Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (laporan)		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK TINGKAT DESA DAN KECAMATAN YANG TERTANGANI	100%	14.449.700
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (orang)	52 Org	14.449.700
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	50 Org	9.999.800
5.1.2	Penanganan Konflik Sosisal sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (laporan)	1 lap	2.450.000
5.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1 dok	1.999.900
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA BERTATA KELOLA PEMERINTAHAN BAIK	21,05%	26.500.920
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik (desa)	118 ds	26.500.920
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	19	2.000.000
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (dokumen)	19	14.500.300

6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (dokumen)	19	2.000.000
6.1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (dokumen)	4	2.000.400
6.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)	19	1.999.820
6.1.6	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (dokumen)	19	2.000.400
6.1.7	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (dokumen)	19	2.000.000
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	33,85 indeks	751.000
		IRB	31,50 skor	359.821.100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	2 dok	751.000
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 dok	253.500
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 dok	497.500
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang tersedia(paket)	19 paket	66.631.900
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	2 paket	2.200.000
1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan (paket)	5 paket	2.500.000
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	5 paket	53.728.400
1.2.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2 paket	1.950.000

1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	5 lap	5.000.000
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (laporan)	1028 lap	208.394.200
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1000 lap	2.263.000
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan (laporan)	12 lap	14.160.000
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	16 lap	191.971.200
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)	39 unit	84.795.000
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	6 unit	2.160.000
1.4.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	25 unit	7.500.000
1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	5.030.000
1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	1 unit	25.000.000
1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	1 unit	45.105.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG AKTIF	82%	92.298.000
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga peserta Musrenbang (Desa + Kecamatan) (lembaga)	24 lembaga	65.998.000
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	3 lemb	8.950.000
3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3	57.048.000

		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (pokmas / ormas)	ormas/pokmas	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (lembaga)	1 lemb	26.300.000
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	1 lemb	26.300.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK TINGKAT DESA DAN KECAMATAN YANG TERTANGANI	100%	14.850.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (orang)	25 Org	14.850.000
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	25 Org	14.850.000
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	33,85 indeks	1.034.000
		IRB	31,50 skor	319.520.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)	3 dok	1.034.000
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 dok	470.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1 dok	282.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1 dok	282.000

1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aktivitas administrasi umum perangkat daerah yang tersedia(paket)	19 paket	113.211.500
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	2 paket	500.000
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan (paket)	6 paket	1.250.000
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	3 paket	50.149.000
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	2 paket	11.477.500
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	1 dok	1.320.000
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	16 lap	48.515.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia (unit)	34 unit	29.565.000
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	32 unit	22.000.000
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli (unit)	2 unit	7.565.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (laporan)	30 lap	154.720.000
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 lap	2.050.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan (laporan)	3 lap	19.878.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	15 lap	132.792.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)	27 unit	22.023.500
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	6 unit	5.605.000

		pajaknya (unit)		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	5 unit	1.218.500
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	2.560.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/dipelihara (unit)	1 unit	12.640.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG AKTIF	82%	141.822.000
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga peserta Musrenbang (Desa + Kecamatan) (lembaga)	24 lembaga	129.537.000
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	3 lemb	10.687.000
3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 ormas/pokmas	118.850.000
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan (lembaga)	1 lemb	12.285.000
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	1 lemb	12.285.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK TINGKAT DESA DAN KECAMATAN YANG TERTANGANI	100%	9.400.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (orang)	20 Org	9.400.000
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)	20 Org	9.400.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju good governance sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 93,51\%$	Sangat Baik	
2.	$88,76 < 93,50\%$	Tinggi	
3.	$81,26 < 88,75\%$	Sedang	
4.	$75,51 < 81,25\%$	Rendah	
5.	$\leq 75,50\%$	Sangat Rendah	

**Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	TAHUN 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Kinerja s/d 2022 (%)
			Target 2022	Realisasi	Kinerja (%)		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Cakupan layanan kecamatan	77,72	87,03	111,98	82,73	77,72
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima	2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	79,5	85,49	107,53	87,5	79,5

**Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	Nilai Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	33,85	49,6	146,5	SB
	Meningkatnya penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	Indeks Reformasi Birokrasi	31,50	42,98	136,4	SB
2	Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	Persentase pelayanan publik yang tersedia	85,56	87,78	102,59	SB
3	Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	82	100	121,95	SB
4	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100	100	100	SB
5	Meningkatkan penanganan potensi konflik	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100	100	100	SB
6	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	21,05	47,36	224	SB

Berdasarkan tabel 3.1.2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Cakupan layanan kecamatan taman tahun 2022 mengalami peningkatan dari target sebelumnya yaitu 87,03 dari jumlah yang ada dengan capaian lebih dari 100%.
- b. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan taman yang di dapat sangat baik. Hal tersebut di peroleh dari hasil perhitungan target dan realisasi yang mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu 85,49 dengan capaian melebihi 100%. Rasio ini digunakan untuk melihat kualitas penyelesaian layanan masyarakat yang tersampaikan apakah layanan tersebut memuaskan atau tidak, dengan adanya layanan yang memuaskan yang didapat, Kecamatan Taman selama tahun 2022 dapat tertangani semua dengan baik.

Berdasarkan tabel 3.1.3 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari seluruh sasaran dan indikator pada tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing sasaran dan indikator telah tercapai secara maksimal. Namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan, agar target pada akhir masa periode Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

SASARAN I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tabel 3.1.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2021	TAHUN 2022			Renstra	
	2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir (2026)	Kinerja s/d 2022
Cakupan Layanan Kecamatan	-	-	86,92	77,72	87,03	111,98	82,73	77,72
Persentase Capaian Sasaran I								

Indikator Cakupan Layanan Kecamatan diperoleh dari rerata perhitungan 5 (lima) sub indikator pelayanan yang ada di Kecamatan Taman. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (1) \text{Persentase pelayanan publik yang tersedia} + \\ & (2) \text{Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif} + \\ & (3) \text{Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\ & \quad \text{yang dapat diselesaikan} + \\ & (4) \text{Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\ & \quad \text{yang tertangani} + \\ & (5) \text{Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik} \end{aligned}$$

$$\text{Cakupan Layanan Kecamatan} = \frac{\text{Hasil Rerata 5 Sub Indikator}}{5}$$

Mendasari formulasi di atas, untuk memperoleh nilai realisasi Cakupan Layanan Kecamatan diperlukan perhitungan kinerja realisasi masing-masing sub indikatornya terlebih dahulu.

Di sepanjang tahun 2022, Kecamatan Taman telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan publik yang tersedia;

Indikator ini menunjukkan sejauhmana kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Taman kepada masyarakat. Indikator ini diukur melalui hasil rerata dari Persentase data pemerintahan yang dipublikasi; persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, dan persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia. Di tahun 2022, telah dilaksanakan layanan dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase data pemerintahan yang di publikasi;

Terdapat 4 jenis data yang wajib dipublikasikan oleh Kecamatan, baik melalui laman resmi Kecamatan maupun pada sosial media yang dimiliki, yaitu Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, ringkasan Program dan Kegiatan tahun 2022, ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022, dan Realisasi program dan Kegiatan tahun 2022 hingga akhir tahun 2022, Kecamatan Taman telah mengunggah 4 jenis data pada melalui web OPD Kecamatan Taman (taman.pemalangkab.id) yaitu Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, ringkasan Program dan Kegiatan tahun 2022, ringkasan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022, dan Realisasi program dan Kegiatan tahun 2022. Sedangkan untuk sosial media Kecamatan Taman digunakan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Taman

Mendasari hal tersebut, maka realisasi Persentase data pemerintahan yang dipublikasi adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah data yang dipublikasikan}}{\text{total data yang wajib dipublikasikan}} \times 100 \\ &= \frac{4}{4} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

b. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan;

Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan diperoleh dari:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah aduan masyarakat yang terselesaikan}}{\text{jumlah seluruh aduan masyarakat}} \times 100 \\ &= \frac{100}{100} \times 100 \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Di tahun 2022, tidak ada pengaduan masyarakat.

c. Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, terdapat 30 jenis layanan yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

Pada tahun 2022, terdapat 19 layanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Taman dengan rincian sebagai berikut:

- Menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan linmas dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- Menyelenggarakan penyelesaian gangguan Trantib yang bersifat umum di wilayahnya
- Menyelenggarakan pelatihan linmas dalam penanggulangan bencana di wilayahnya
- Mengkoordinasi pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, serta wanita rawan sosial ekonomi
- Membina kegiatan karang taruna
- Menyelenggarakan pendataan penanganan pengemis, gelandangan, gangguan jiwa dan anak terlantar (PGOT) di luar panti
- Merekomendasikan penerimaan bantuan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Menyelenggarakan pendataan/pemutahiran penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Menyelenggarakan pendataan korban bencana
- Menerbitkan izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/desa di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan diluar kegiatan lalu lintas/ transportasi
- Menyelenggarakan penelitian berkas usulan pengesahan anggota BPD
- Menyelenggarakan pengucapan sumpah janji, peresmian dan pengesahan anggota BPD
- Menyelenggarakan pengesahan pemberhentian anggota BPD

- Menyelenggarakan pengisian dan pengesahan pengangkatan anggota BPD antarwaktu menjadi anggota BPD
- Menyelenggarakan pengangkatan dan pemberhentian pelaksanaan tugas harian kepala desa
- Menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala desa antarwaktu
- Menerbitkan izin spanduk/layar umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah kecamatan
- Menerbitkan poster/stiker/selebaran pemasangan dan/atau penyebaran dalam 1 (satu) wilayah kecamatan
- Menyelenggarakan pengawasan kas opname anggaran desa

Berdasarkan data tersebut di atas, maka Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia di tahun 2022 adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{jumlah layanan berdasar pelimpahan kewenangan yang diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh permintaan layanan erdasar pelimpahan kewenangan}} \times 100 \\
 &= \frac{19}{30} \times 100 \\
 &= 63,33 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui Persentase Pelayanan Publik yang tersedia pada Kecamatan Taman di tahun 2022 adalah sebesar 87,78 %, dengan rician sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\% \text{ data pemerintahan yang dipublikasi} + \% \text{ pengaduan masyarakat yang terselesaikan} + \% \text{ pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan}}{3} \\
 &= \frac{\dots\% + \dots\% + \dots\%}{3} = \dots \% \\
 &= \frac{100\% + 100\% + 63,33\%}{3} \\
 &= 87,78 \%
 \end{aligned}$$

2. Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif;

Sub indikator Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Aktif diperoleh dari Rerata Persentase Kehadiran Musrembang Desa, Musrembang Kelurahan, dan Musrembang Kecamatan. Makin tinggi hasil realisasinya menunjukkan makin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan tersebut.

Persentase keterlibatan masyarakat melalui kegiatan Musrembang dapat diukur dengan rincian sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ kehadiran di Musrembang desa} + \% \text{ kehadiran di Musrembang Kelurahan} + \% \text{ kehadiran di Musrembang Kecamatan}}{\text{jumlah keg Musrembang yang ada}}$$

Tahun 2022, Kecamatan Taman mengadakan 19 Musrembang desa, 2 Musrembang Kelurahan, dan 1 Musrembang Kecamatan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

$$= \frac{\% \text{ Murembang Desa a (dst)} + \% \text{ Musrembang Kelurahan 1 (dst)} + \% \text{ Musrembang Kecamatan} + \text{dst}}{\text{Jumlah keg Musrembang yang ada}}$$

$$= \frac{\dots\% + \dots\% + \dots(\text{dst}) \dots}{\dots} = \dots$$

$$= \frac{100\% + 100\% + 100\%}{3}$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan data sebagaimana tercantum di atas, maka dapat diketahui Persentase Masyarakat desa dan kelurahan yang aktif pada Kecamatan Taman di tahun 2022 adalah sebesar 100 %

3. Gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh gangguan trantibum tingkat desan dan kecamatan}} \times 100$$

Sepanjang tahun 2022, tidak ada gangguan trantibum.

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan hal tersebut, maka Persentase Gangguan Trantibum Tingkat Desa dan Kecamatan yang dapat diselesaikan di tahun 2022 mencapai 100 %.

4. Potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani;

Sub indikator ini memiliki formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh potensi konflik tingkat desan dan kecamatan}} \times 100$$

Sepanjang tahun 2022, tidak ada potensi konflik.

$$= \frac{100}{100} \times 100$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan hal tersebut, maka Persentase Potensi Konflik Tingkat Desa dan Kecamatan yang Dapat Diselesaikan di tahun 2022 mencapai 100 %.

5. Desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Sub indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Desa Bertata kelola Pemerintahan yang baik diukur dari kelengkapan serta kualitas administrasi desa, yang meliputi kelengkapan SPJ, kelengkapan pelaporan tepat waktu.

Kecamatan Taman memiliki 19 desa. Di tahun 2022, Kecamatan Taman telah melakukan kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi masing-masing desa. Mendasari kegiatan tersebut, maka dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Taman, terdapat 9 desa (Kabunan, Kejambon, Penggarit, Banjardawa, Sokawangi, Kedungbanjar, Kaligelang, Jrasah, dan Taman) yang termasuk dalam kategori desa bertata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan sisanya belum dapat memenuhi kelengkapan dengan rincian sebagai berikut:

- Desa yang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) belum tepat waktu
- Desa yang menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) elum tepat waktu
- Desa yang menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum tepat waktu
- Desa yang menetapkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPDes) belum tepat waktu

Berdasarkan hal tersebut, maka Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik Kecamatan Taman di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah gdesa bertata kelola pemerintahan baik}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100$$

$$= \frac{9}{19} \times 100$$

$$= 47,36 \%$$

Mendasari hasil perhitungan dari kelima sub indikator sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Cakupan Layanan Kecamatan Taman tahun 2022 adalah:

$$\begin{aligned}
& \text{(1) Persentase pelayanan publik yang tersedia +} \\
& \text{(2) Persentase masyarakat desa kelurahan yang aktif +} \\
& \text{(3) Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan} \\
& \text{yang dapat diselesaikan +} \\
& \text{(4) Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan} \\
& \text{yang tertangani +} \\
& \text{(5) Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik} \\
\text{Cakupan Layanan Kecamatan} &= \frac{\dots}{5} \\
&= \frac{\dots\% + \dots\% + \dots\% + \dots\% + \dots\%}{5} = \dots\% \\
&= \frac{87,78\% + 100\% + 100\% + 100\% + 47,36\%}{5} = 87,03\%
\end{aligned}$$

Permasalahan

1. Fasilitasi saat monitoring musdes dan monev pendampingan desa serta pendampingan malam hari kurang memadai
2. Pada desa-desa yang ada pada kecamatan Taman sumber daya aparat relatif masih kurang dan kurang mempunyai kemauan untuk membekali diri dengan kemampuan dalam mengelola administrasi desa.

Solusi

1. Perlunya fasilitasi saat monitoring musdes dan monev pendampingan desa serta pendampingan malam hari
2. Diperlukan penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi desa untuk membimbing perangkat desa sesuai bidang tugasnya secara berkala

Program Pendukung

1. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
2. Fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa

SASARAN II

Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima

Tabel 3.2.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Prima

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2021	TAHUN 2022			Renstra	
	2019	2020		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir (2026)	Kinerja s/d 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	78,48	79,5	85,49	107,53	87,5	79,5
Persentase Capaian Sasaran I								

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kecamatan Taman guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pengukuran ini bertujuan agar Kecamatan Taman dapat mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan secara detil, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan layanan. Sejak tahun 2021, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sepanjang tahun dan dilaporkan dua kali (per semester) sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat tahunan diperoleh dari rerata IKM semester 1 dan IKM semester 2.

Sepanjang tahun 2022, Kecamatan Taman setidaknya telah melaksanakan survei terhadap pengguna layanan. Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada Semester 1 adalah sebesar 84,75 sedangkan pada Semester 2 sebesar 86,23, sehingga IKM Kecamatan Taman di tahun 2022 adalah sebesar 85,49 dengan kategori **Sangat Tinggi** Jika disandingkan dengan target di tahun 2022 sebesar 79,5, maka capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman tahun 2022 mencapai 107,53%. Sedangkan jika disandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, maka capaian kinerjanya mencapai 97,70%.

Berdasarkan hasil survei, maka dapat disimpulkan bahwa di tahun ini, komponen yang tertinggi adalah Komponen Biaya sedangkan yang terendah adalah Sarana dan Prasarana. Hasil IKM ini menjadi cerminan sudut pandang masyarakat mengenai gambaran layanan Kecamatan Taman, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar masukan dalam upaya peningkatan layanan Kecamatan Taman.

Permasalahan

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
2. Personal/ petugas layanan memasuki masa pensiun

Solusi

1. Peningkatan pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dengan didukung peningkatan kapasitas petugas pelayanan dengan program inovatif.
2. Meningkatkan kualitas dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Taman

Program Pendukung

1. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Taman telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian kinerja diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.1 Capaian/Serapan Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Taman
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN (PENYERAPAN)
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.645.175.880	5.435.304.278	96,28
		689.887.540	689.397.970	99,93
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.999.880	10.999.880	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.900	1.999.900	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.800	1.999.800	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.080	1.000.080	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.999.900	1.999.900	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.300	2.000.300	100
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.900	1.999.900	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.634.176.000	5.424.304.398	96,28
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.633.176.000	5.423.304.398	96,27
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	2.000.000	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.988.540	199.988.300	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.200.000	5.200.000	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.095.000	118.095.000	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.693.540	59.693.300	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	2.000.000	100
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	30.000.000	100
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.291.400	269.802.070	99,82
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.995.800	12.995.800	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.414.000	45.201.870	99,53
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.881.600	211.604.400	99,87
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.607.600	187.607.600	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.162.000	25.162.000	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.645.600	33.645.600	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.800.000	128.800.000	100
2	PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	24.500.100	24.500.100	100
2.1	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	16.999.500	16.999.500	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.999.500	16.999.500	100
2.2	Penyelenggara Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan	2.000.400	2.000.400	100

	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.000.400	2.000.400	100
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.500.200	5.500.200	100
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.140.400	1.140.400	100
2.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	4.359.800	4.359.800	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.500.760	34.500.760	100
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.800	30.000.800	100
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.000.000	2.000.000	100
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18.000.400	18.000.400	100
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.400	10.000.400	100
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.499.960	4.499.960	100
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.999.660	1.999.660	100
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2.500.300	2.500.300	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.000.000	4.000.000	100
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	2.000.000	100
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.000.000	2.000.000	100

4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.000.000	2.000.000	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.499.700	14.449.700	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.499.700	14.449.700	100
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.999.800	9.999.800	100
5.1.2	Penanganan Konflik Sosisal sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.450.000	2.450.000	100
5.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.999.900	1.999.900	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.500.920	26.500.900	100
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.500.920	26.500.900	100
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	2.000.000	100
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.500.300	14.500.300	100
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000	2.000.000	100
6.1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.400	2.000.400	100
6.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.999.820	1.999.800	100
6.1.6	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.000.400	2.000.400	100
6.1.7	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.000.000	2.000.000	100
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	751.000	748.600	99,68
		359.821.100	356.349.827	99,04

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	751.000	748.600	99,68
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	253.500	253.500	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	497.500	495.100	99,52
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.631.900	66.520.350	99,83
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.200.000	2.200.000	100
1.2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	2.500.000	100
1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.728.400	53.662.100	99,88
1.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.950.000	3.203.250	99,99
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	4.955.000	99,10
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.394.200	205.827.977	97,50
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.263.000	2.200.000	97,22
1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.160.000	11.973.732	84,56
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.971.200	191.654.245	99,83
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.795.000	84.001.500	99,06
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.160.000	1.459.500	67,57
1.4.2	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	7.500.000	100,00
1.4.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000	5.030.000	100,00
1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00
1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.105.000	45.012.000	99,79
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	92.298.000	90.581.024	98,14
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	65.998.000	65.145.400	98,71
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.950.000	8.349.400	93,29

3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	57.048.000	56.796.000	99,56
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	26.300.000	25.435.624	96,71
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	26.300.000	25.435.624	96,71
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.850.000	14.170.700	95,43
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.850.000	14.170.700	95,43
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.850.000	14.170.700	95,43
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.034.000	1.034.000	100
		319.520.000	315.235.226	98,66
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.034.000	1.034.000	100
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	470.000	470.000	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	282.000	282.000	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	282.000	282.000	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.211.500	113.211.500	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	500.000	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.250.000	1.250.000	100
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.149.000	50.149.000	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.477.500	11.477.500	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.515.000	48.515.000	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.565.000	29.565.000	100
1.5.1	Pengadaan Mebel	22.000.000	22.000.000	100

1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.565.000	7.565.000	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.720.000	151.164.326	97,70
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.050.000	2.050.000	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.878.000	18.159.828	91,36
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.792.000	130.954.498	98,62
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.023.500	21.294.400	96,69
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.605.000	4.875.900	86,99
	Pemeliharaan Mebel	1.218.500	1.218.500	100
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.560.000	2.560.000	100
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.640.000	12.640.000	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	141.822.000	141.522.000	99,79
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	129.537.000	129.237.000	99,77
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.687.000	10.687.000	100
3.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.850.000	118.550.000	99,75
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.285.000	12.285.000	100
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12.285.000	12.285.000	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.400.000	9.400.000	100
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.400.000	9.400.000	100
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.400.000	9.400.000	100

Dari tabel 3.2.1 dapat diketahui Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang di tetapkan Restra Kecamatan Taman. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Taman maka didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Taman. Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Taman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi yaitu dengan nilai 97,01%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis. Dari tabel tersebut diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 2021-2026.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Taman Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel 3.3.1 sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	33,85	49,6	146,5	5.646.960.880	5.437.086.878	96,28	50,22
	Meningkatnya penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	31,50	42,98	136,4	1.369.228.640	1.360.983.023	99	37,4
2	Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	85,56	87,78	102,59	24.500.100	24.500.100	100	2,59
3	Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	82	100	121,95	268.620.760	266.603.784	99	22,95
4	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	100	100	100	4.000.000	4.000.000	100	-
5	Meningkatkan penanganan potensi konflik	100	100	100	38.699.700	38.020.400	98	2
6	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	21,05	47,36	224	26.500.920	26.500.900	100	124

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Taman, disampaikan bahwa rata-rata indikator kinerja efektif tercapai lebih dari 100% atau sama dengan dan efisien dalam penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan yang ada. Selain itu juga efisiensi disebabkan karena kinerja jauh lebih tinggi dari target kinerja yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa kinerja tetap berjalan dengan menggunakan anggaran yang tidak terlalu besar, sehingga dapat menambah tingkat tingkat efisiensi anggaran.

3.4 Inovasi

Inovasi Kecamatan Taman yaitu pembuatan papan alur pelayanan dan informasi lainnya sebagai wujud transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat adanya papan alur pelayanan dan informasi di Kecamatan Taman Masyarakat mendapatkan pelayanan cepat dan bebas pungli serta dengan syarat dan waktu layanan yang jelas.

DOKUMENTASI:



BAB IV PENUTUP

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselaran antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap OPD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Taman tahun 2022 ini merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKJIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang di dukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2022 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Taman berupaya dengan gigih agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Kami menyadari bahwa LKJIP Kecamatan Taman tahun 2022 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang. Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Taman untuk terus mengoptimalkan target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.

Taman 31 Desember 2022

CAMAT TAMAN



FAUZAN, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720420 199303 1 004

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAUZAN, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **Camat Taman**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT, S.T.**
Jabatan : **Plt. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

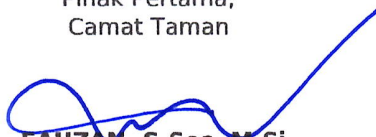
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG


MANSUR HIDAYAT, S.T.

Pemalang, 17 Oktober 2022
Pihak Pertama,
Camat Taman


FAUZAN, S.Sos, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (Perubahan)
KECAMATAN TAMAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	77,72
2	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Taman	Indeks	79,5

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	31,50
	Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	Nilai Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai	33,85
2	Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	85,56
3	Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	82
4	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100
5	Meningkatkan penanganan potensi konflik	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100
6	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	21,05

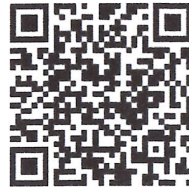
No	Program	Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.016.189.520
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.500.100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	268.620.760
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.000.000

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.699.700
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.500.920
Total Anggaran		7.378.511.000

Pihak Kedua,
Pit. BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT, S.T.



Pemalang, 17 Oktober 2022
Pihak Pertama,
Camat Taman



FAUZAN, S.Sos, M.Si

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	87,5
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	75,22	76,47	77,72	78,98	80,23	80,43	82,73	82,73

CAMAT TAMAN

FAUZAN S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19720420 199303 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	79,5	85,49	107,53
2	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	77,72	87,03	111,98

CAMAT TAMAN



FAUZAN S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720420 199303 1 004

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN
2022 PADA KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 700/31/EVS/2022
TANGGAL : 21 JULI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

Nomor : 700/31/EVS/2022
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2022.

Pemalang, 21 Juli 2022

Kepada Yth.
Camat Taman
Di –

TAMAN

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Taman, dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

1.1. Dasar Hukum Evaluasi.

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/16/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

f) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor :
700/001/EVS/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

1.2. Latar Belakang Evaluasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran-kinerja yang berorientasi pada hasil (**outcome**). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "**self assesment**", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "**self-assesment**" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (**continues improvement**).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi.

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi.

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja

- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi.

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim.

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggungjawab	:	Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si
2.	Dalnis/Supervisor	:	Drs. HERI SUYATNO
3.	Ketua Tim	:	ADJI NUSWANTORO, S.Hut
4.	Anggota	:	AGUS HASANI, S.IP., MM.
5.	Anggota	:	MINTARSIH, SE
6.	Anggota	:	SRI PANGASTUTI, SE
7.	Anggota	:	KUNENDAR, SE

1.7. Gambaran Umum Kecamatan Taman:

- a) Dasar hukum pembentukan.

Kecamatan Taman dibentuk melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;

2. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang.

b) Kedudukan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

c) Tugas dan Fungsi.

Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan Kelurahan yang ada di Wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan dan penegakkan perda dan peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kecamatan Taman.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kecamatan Taman berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati Pemalang yaitu Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Kecamatan di Kabupaten Pemalang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 2 (dua).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Taman adalah 100 %, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja (IK) adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh.	77,5	77,5	100
2.	Cakupan layanan Kecamatan.	73,66	73,66	100

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2021 termasuk dalam kategori baik. Ke dua indikator mencapai 100 % sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Kecamatan Taman pada Tahun 2021.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun lalu diketahui terdapat 14 (empat belas) rekomendasi, dan belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI.

2.1. Kondisi.

2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja.

Komponen perencanaan kinerja pada Kecamatan Taman pada Tahun 2022 mendapatkan nilai 21 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut

dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 4,20 dengan bobot sebesar 6 %, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 6,3 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 10,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Taman pada Tahun 2022 telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja sebanyak 5 (lima) kriteria dari 6 (enam) kriteria yaitu berupa :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.
3. Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Pendek.
4. Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja.
5. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja.

Sedangkan dokumen Perencanaan Kinerja yang belum ada adalah :

1. Pedoman Tekhnis Perencanaan Kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 70.

b. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Taman yang telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
3. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
6. Target yang ditetapkan dalam perencanaan dapat dicapai, menantang, dan realistis.

7. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
8. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
9. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
2. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 70,00.

c. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Kecamatan Taman yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria dari 8 (delapan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
5. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
6. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
2. Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 60,00.

2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Taman mendapatkan nilai 14,7 dengan bobot penilaian sebesar 30 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 1,8 dengan bobot sebesar 6 %, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 5,4 dengan bobot sebesar 9 %, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 7,5 dengan bobot 15 %.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Taman belum melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja dari 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu :

Sedangkan dokumen Pengukuran Kinerja yang belum ada adalah :

1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2. Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 30.

b. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan Taman yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
2. Data Kinerja dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
3. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
4. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
3. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 50.

c. **Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja.**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Kecamatan Taman yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja
4. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi
3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
5. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
6. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja adalah 50.

2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kecamatan Taman mendapatkan nilai 7,8 dengan bobot penilaian sebesar 15 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 1,8 dengan bobot sebesar 3 %, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 2,25 dengan bobot sebesar 4,5 %, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 3,75 dengan bobot 7,5 %.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja.**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Taman telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja sebanyak 2 (dua) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang ada yaitu :

1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
4. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Sedangkan dokumen Pelaporan Kinerja yang belum ada adalah :

1. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 60.

b. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Kecamatan Taman yang telah memenuhi 4 (empat) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 50.

c. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Kecamatan Taman yang telah memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 7 (Tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Adapun kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
2. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
3. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 50.

2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kecamatan Taman mendapatkan nilai 8,5 dengan bobot penilaian sebesar 25 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 2,50 dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 2,25 dengan bobot sebesar 7,50 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 3,75 dengan bobot 12,50 %.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Kecamatan Taman telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah memenuhi 1 (satu) kriteria dari 3 (Tiga) kriteria yang ada yaitu :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.

Sedangkan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum ada adalah :

1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Taman yang telah memenuhi 1 (satu) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
2. Evaluasi Akuntabilitas internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 50.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Taman yang telah memenuhi 1 (satu) kriteria dari 5 (Lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

1. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 30.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja.

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Taman pada Tahun 2022 mendapatkan skor 49,6 dengan predikat kinerja " KURANG " (C).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30	18,6
		a. Keberadaan	6	4,20
		b. Kualitas / Mutu	9	5,40
		c. Pemanfaatan	15	9
2.	Pengukuran Kinerja		30	14,7
		a. Keberadaan	6	1,80
		b. Kualitas / Mutu	9	5,4
		c. Pemanfaatan	15	7,50
3.	Pelaporan Kinerja		15	7,8
		a. Keberadaan	3	1,8
		b. Kualitas / Mutu	4,50	2,25
		c. Pemanfaatan	7,50	3,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00	8,5
		a. Keberadaan	5	2,50
		b. Kualitas / Mutu	7,5	2,25
		c. Pemanfaatan	12,50	3,75
	Total Nilai		100	49,6

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian Tahun sebelumnya 2021 mengalami peningkatan sebesar 24,74 yaitu dari 24,86 menjadi 49,6 pada Tahun 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada sedikit perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.2. Rekomendasi.

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja hendaknya dipublikasikan tepat waktu dan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, serta dapat menyajikan perbaikan/penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya guna capaian kinerja yang lebih baik.
- 3) Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur Indikator Kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, dan Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, serta Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), Pengukuran Kinerja hendaknya dapat berpengaruh pada Strategi, Kebijakan dalam mencapai kinerja, serta Setiap unit/satuan kerja atau setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja hendaknya dipublikasikan (melalui Website Kecamatan terkait) dan disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kinerja hendaknya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- 5) Agar menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai standart dengan pendalaman yang memadai, serta hendaknya hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

B. PENUTUP.

3.1. Simpulan.

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi.

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kecamatan Taman memperoleh nilai 49,6 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,6
b.	Pengukuran Kinerja	30	14,7
c.	Pelaporan Kinerja	15	7,8
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	8,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	49,6

3.1.2. Kategori Penilaian.

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 49,6 Kecamatan Taman termasuk dalam kategori penilaian " KURANG " (C) dengan interpretasi Tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan.

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Camat Taman agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong setiap pegawai untuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Pengukuran Kinerja untuk menjadi dasar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

- 3) Melakukan reviu dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator internal.

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG



EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008.

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN

Jl. Piere Tendean Nomor 02 Kode Pos 52361
Telp. (0284) 3277621

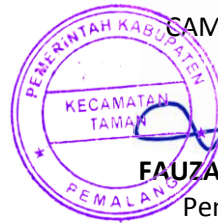
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP 2022

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah terhadap dokumen SAKIP Kecamatan Taman Nomor 051.2/152/ Tanggal 02 Februari perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2022, maka dilakukan Tindak Lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dan telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SANGAT BAIK menggunakan <i>cascading</i> di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja seksi lainnya.
2	Dokumen Perencanaan Kinerja hendaknya dipublikasikan tepat waktu dan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, serta dapat menyajikan perbaikan /penyempurnaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya guna capaian kinerja yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu• Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja• Terdapat perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya• Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik• Rencana aksi dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala
3	Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, dan setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat mekanisme dan definisi operasional yang jelas terhadap pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dapat diandalkan• Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan• Pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja memanfaatkan

	<p>capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, serta Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), Pengukuran Kinerja hendaknya dapat berpengaruh pada Strategi, Kebijakan dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja atau setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p>	<p>teknologi informasi (Aplikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja • Setiap unit/satuan kerja atau setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
4	<p>Dokumen Laporan Kinerja hendaknya dipublikasikan (melalui Website Kecamatan terkait) dan disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kinerja hendaknya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen laporan kinerja dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu • Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja • Dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya • Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja • Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) • Informasi dalam laporan telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
5	<p>Agar menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang sesuai standar dengan pendalaman yang memadai, serta hendaknya hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>	<p>Telah dilakukan evaluasi internal pencapaian kinerja perangkat daerah pertriwulan dengan melibatkan Badan Perencanaan Daerah, Inpektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan pengukuran rencana aksi yang</p>

menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntansi kinerja internal, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	dijadikan dasar peningkatan kinerja dan menyelesaikan permasalahan beserta solusi yang akan ditempuh
--	--



CAMAT TAMAN

FAUZAN S.Sos.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19720420 199303 1 004

DOKUMENTASI INOVASI:

